

PENYEBAB KETIDAKHARMONISAN KELUARGA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2007-2021

Rizka Jafar¹, Miftahul Jannah², Abdul Rahman³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rizka.jafar@uin-alauddin.ac.id¹, miftahuljannahrr23@gmail.com²,
abdul.rahman1582@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak:

Ketidakharmoisan keluarga merupakan kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga dalam menjaga keutuhan keluarganya atas berbagai permasalahan. Salah satu unsur pembangunan nasional adalah menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Sebab keluarga merupakan manifestasi sosial penting dalam membentuk kekuatan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran per kapita, pengangguran, tingkat pendidikan dan pernikahan usia dini terhadap ketidakharmoisan keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2007-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 79,44% variabel bebas dalam penelitian yakni pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan keputusan menikah muda berpengaruh terhadap ketidakharmoisan keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya sebesar 20,56% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian hasil penelitian juga memperlihatkan bahwasanya variabel pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran dan pernikahan usia dini berpengaruh signifikan terhadap ketidakharmoisan keluarga di Sulawesi Selatan selama periode 2007-2021. Sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketidakharmoisan keluarga.

Kata Kunci: *Pengeluaran Per Kapita, Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Pernikahan Usia Dini, Ketidakharmoisan Keluarga*

Abstract:

Family disharmony is a condition of a household's inability to maintain the integrity of the family over various problems. One element of national development is maintaining family harmony and welfare. Because the family is an important social manifestation in forming national development forces. This research aims to determine the influence of per capita expenditure, unemployment, education level, and early marriage on family disharmony in South Sulawesi Province during 2007-2021. This type of research is quantitative research with multiple linear regression analysis techniques. It uses secondary data obtained from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) and the Makassar High Religious Court. The results of the research show that 79.44% of the independent variables in the research, namely per capita expenditure, unemployment rate, education level, and the decision to marry young, influence family disharmony in South Sulawesi Province, while the remainder is other variables outside the research influence 20.56%. The research results also show that the variables per capita expenditure, unemployment rate, and early marriage have a

significant effect on family disharmony in South Sulawesi during the 2007-2021 period. Meanwhile, the level of education does not affect family disharmony.

Keywords: *Per Capita Expenditure, Unemployment, Education Level, Early Marriage, Family Disharmony*

PENDAHULUAN

Membangun keluarga yang harmonis merupakan tugas penting dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang harmonis adalah tentang saling peduli dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kebahagiaan keluarga. Setiap anggota keluarga diwajibkan untuk bisa meluangkan waktu untuk kegiatan keluarga (Madisa, 2017). Konteks pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari pembahasan mengenai kesejahteraan keluarga. Keluarga adalah aspek sosial penting yang perlu mendapat perhatian. Kekuatan pembangunan nasional berasal dari unsur keluarga dan menjadi komunitas mikro masyarakat. Pembangunan keluarga memerlukan intervensi yang beragam namun berkelanjutan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, tangguh dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat di setiap tahap kehidupan. Keluarga sejahtera adalah fondasi dari integritas, ketahanan dan pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, keluarga juga rentan terhadap terjadinya bercerai-berai berkontribusi pada lemahnya mata pencaharian masyarakat nasional. Pentingnya membangun keharmonisan keluarga merupakan salah satu unsur pembangunan nasional (Zalfa, 2019).

Ketidakharmonisan keluarga merupakan suasana hati yang buruk yang terjadi dalam hubungan keluarga. Di mana hubungan buruk ini berujung pada perceraian (Syari et al., 2017). Ketidakharmonisan keluarga terjadi karena dalam sebuah rumah tangga, masing-masing anggota tidak lagi menyepakati arah dan tujuan, terutama mereka yang memegang peran utama dalam keluarga, yaitu suami dan istri. Kepenuhan kasih sayang dan cinta tidak akan terwujud jika terjadi pertengkaran atau pertengkaran, sehingga keharmonisan tidak terjalin (Ni'mah, 2018). Ketidakharmonisan keluarga terjadi ketika seseorang dalam keluarga tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, sehingga tanggung jawab yang diembannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan dengan demikian menyebabkan permasalahan atau konflik internal (Hadi dkk., 2020).

Ketidakharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang tidak mampu menjaga keharmonisan keluarganya sehingga berakhir perceraian dan berstatus janda dan duda, karena perceraian merupakan upaya terakhir ketika semua langkah diambil untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak ada yang berubah. Latifah (2020) menyatakan bahwa dalam hubungan pernikahan, sudah pasti ada permasalahan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri, maka hal ini dituntut untuk bisa saling mengerti dan membantu dalam menyelesaikan masalah. Adapun faktornya adalah kurangnya saling pengertian sehingga pasangan tidak saling memperhatikan kewajiban dan segala bentuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Sedangkan, Amelia (2017) menyatakan bahwa perselisihan keluarga merupakan salah satu penyebab perceraian. Pasangan yang tidak memahami tujuan pernikahan keluarga

merupakan salah satu faktor yang kurang baik bagi keharmonisan keluarga.

Tanggung jawab seorang suami adalah memenuhi kebutuhan keluarga, olehnya hubungan antara kadar pemberian nafkah dan keharmonisan keluarga sangat penting (Wijaya, 2022). Kekurangan nafkah dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi tingkat kesejahteraan dalam keharmonisan keluarga bukan hanya ukuran fisik dan mental yang terlihat, tetapi juga ukuran kesehatan. Kesejahteraan keluarga dapat dibagi menjadi kesejahteraan ekonomi keluarga (pendapatan, upah, kekayaan, pengeluaran) dan kesejahteraan keluarga dari materi (diukur dalam bentuk barang dan jasa yang tersedia untuk keluarga). Konsep kesejahteraan erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga, penggunaan konsep pemuasan kebutuhan, sehingga seseorang dapat dinilai sejahtera.

Nafkah adalah bagian penting yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menyebabkan keretakan (Syakhsiyah, 2022). Fungsi konsumsi Keynes menyatakan bahwa ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat, umumnya dikenal dengan istilah nafkah, sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita masyarakat di suatu negara ataupun daerah, sedangkan mutu kehidupan dapat dilihat dari besarnya pengeluaran konsumsi untuk mempertahankan derajat hidup individu dan keluarga secara wajar (Afif & Sasana, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita yang rendah akan membuat keluarga mampu mempertahankan rumah tangganya (Hariyadi, 2015; T. Herawati dkk., 2017; Husniah dkk., 2022; Siregar, 2018; Sofyan, 2011) mengemukakan pengeluaran per kapita yang semakin meningkat akan berpengaruh positif terhadap ketidakharmonisan keluarga. Di lain sisi, T., Herawati dkk., (2017) menemukan bahwa pengeluaran per kapita yang rendah akan berpengaruh negatif terhadap ketidakharmonisan keluarga. Dengan demikian, jumlah anggota keluarga yang banyak secara keseluruhan dapat menjadi penyebab tekanan ekonomi keluarga, sehingga mengakibatkan pola asuh yang kurang pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Oleh karena itu, keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan lebih rentan mengalami perceraian (T., Herawati dkk., 2017).

Selain faktor nafkah, keretakan rumah tangga juga sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pasangan. Totoh (2020) menyatakan melalui pendidikan, keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai inti pendidikan demi terciptanya pendidikan yang dapat mengembangkan kecerdasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di samping itu, pendidikan juga dapat menjadi faktor terjadinya perubahan perilaku dan pola hidup sehat di masyarakat (Siregar, 2018). Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat *output* yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan demikian, semakin baik pendidikan seseorang, maka pengangguran akan berkurang demikian pula sebaliknya. Pendidikan yang rendah disinyalir menjadi penyebab sulitnya mencari pekerjaan di suatu daerah. Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan masalah kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, di antaranya dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Marzuki & Watampone, 2016). Demikian pula jika dikaitkan dengan ketidakharmonisan keluarga. Santosa dkk. (2020) menyatakan perceraian mempunyai hubungan positif terhadap

tingginya angka pengangguran.

Tingkat pendidikan masyarakat akan memengaruhi kematangan emosional individu dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Apriliani & Nurwati (2020) menemukan bahwa latar belakang pendidikan juga dapat mempengaruhi pernikahan usia dini. Pendidikan yang rendah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Pasangan yang nikah pada usia muda tentu saja tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan, termasuk sudah malas untuk berfikir mengenai pembelajaran sekolah, mereka menikah karena tidak ada niat untuk melanjutkan sekolah, ekonomi rendah, adanya perjodohan dan pergaulan bebas sehingga memilih untuk menikah.

Pernikahan dini adalah salah satu masalah yang terus meningkat. Kesiapan untuk berumah tangga belum siap dan keadaan emosi tidak stabil dapat berdampak terhadap keharmonisan dan kualitas keluarga yang dibangun. Tentu saja pernikahan usia dini mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga karena jika mereka memutuskan untuk menikah di usia muda, mereka dipastikan akan berhenti sekolah, yang berujung pada minimnya pengetahuan (Apriliani & Nurwati, 2020). (Eleanora & Putri, 2021) menyatakan bahwa akibat perkawinan anak, anak belum siap secara fisik, mental dan psikis. Adanya perkawinan anak akan membawa perubahan pada masyarakat dalam hal ekonomi, pendidikan dan pekerjaan, serta kesehatan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat. Meningkatnya kasus pernikahan usia dini dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas dan faktor kemauan anak sendiri. Adapun penurunan kasus pernikahan usia dini terjadi karena perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif, mulai dari penurunan pendidikan anak, keadaan ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan baru dan potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Hidayah, 2019).

Berbagai permasalahan dalam ketidakharmonisan keluarga di daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan masih terus dihadapi oleh pemerintah. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara lain dengan naik turunnya angka pengeluaran per kapita, maraknya pengangguran, naik turunnya angka tingkat pendidikan, banyaknya kasus pernikahan usia dini, dan tingginya tingkat perceraian menjadi masalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan berbagai permasalahan penyebab keengganan pasangan suami-istri dalam mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran per kapita, pengangguran, tingkat pendidikan, dan pernikahan usia dini berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2007-2021

TINJAUAN PUSTAKA

Ketidakharmisan Keluarga

Ketidakharmisan keluarga diartikan sebagai hubungan yang tidak selaras dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, jika di dalam rumah tangga terdapat sebuah ketidakbahagiaan, maka keluarga tersebut dinyatakan tidak harmonis (Chikmah, 2021). Sebaliknya, keharmonisan keluarga diartikan sebagai hubungan antaranggota keluarga yang dilandasi oleh cinta kasih, mampu menjalani kehidupan dalam keseimbangan yang

sempurna seperti, fisik, mental, dan emosional baik di dalam keluarga maupun dalam hubungan dengan anggota lainnya, untuk menciptakan situasi yang sinergis. Dengan sikap yang cukup dewasa agar para anggota merasa nyaman di dalamnya dan memenuhi peran mereka dengan sikap yang sepenuhnya matang dan mampu menjalani hidup dengan penuh efisiensi dan kepuasan batin (Andika, 2019).

Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita

Pendapatan dalam rumah tangga digunakan untuk membeli segala kebutuhan hidup (Alimuddin, 2018). Ekonomi mengatakan: Pengeluaran konsumsi tidak hanya mengacu pada makanan, tetapi mencakup seluruh penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Besaran pengeluaran semua anggota keluarga tergantung pada banyak faktor seperti: besarnya jumlah penghasilan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, tingkat harga kebutuhan pokok, tingkat pendidikan dan status sosial. Dengan demikian, ukuran pendapatan merupakan faktor yang sangat penting. Sebab semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga pengeluaran; di sisi lain, jika pendapatan rumah tangga terbatas, maka pengeluaran juga akan terbatas.

Pengangguran

Teori klasik memandang pengangguran sebagai salah satu penyebab alokasi sumber daya terbatas. Oleh karena itu, teori klasik menyatakan bahwa jika ada penawaran tenaga kerja yang besar, maka upah akan turun, yang akan mengurangi *output* perusahaan. Akibatnya, permintaan tenaga kerja akan terus tumbuh karena perusahaan dapat meningkatkan produksi berdasarkan keuntungan dari biaya rendah ini (Alimuddin, 2018). Pengangguran dapat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian serta individu dan masyarakat (Riska Zahara, 2019) di antaranya: (1) Pengangguran mengakibatkan orang tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang diinginkan; (2)

Pengangguran mengakibatkan penerimaan pajak pemerintah lebih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, mengakibatkan rendahnya penerimaan negara dari pajak, dan (3) Pengangguran akan berdampak terhadap kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.

Sukirno dalam (Yacoub, 2013) mengemukakan pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap ketidakharmonisan keluarga. Dampak dari pengangguran ialah akan mengurangi pendapatan dan mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan yang ingin dicapai dalam keluarga. Hal ini akan semakin menurunkan tingkat keharmonisan keluarga karena menganggur, maka akan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, dan akan menimbulkan dampak buruk bagi keharmonisan keluarga dalam jangka panjang.

Tingkat Pendidikan

Irawan (2022) menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsur kebutuhan dasar seluruh umat manusia dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai upaya untuk meningkatkan kepentingan umum dapat diwujudkan melalui pendidikan. Pendidikan juga memiliki dampak yang utuh terhadap pertumbuhan. Hal ini karena pendidikan

mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan penduduk. Akibat rendahnya kualitas pendidikan, hampir semua negara berkembang memiliki masalah dengan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka melek huruf, rendahnya pemerataan pendidikan dan relatif rendahnya tingkat proses pendidikan.

Kontribusi pendidikan dalam pembangunan sungguh tidak dapat dielakkan. Melalui Pendidikan, bukan hanya sumber daya manusia yang berkualitas, berpengetahuan, terampil, dan mampu menguasai teknologi dapat lahir, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan juga masyarakat secara lebih luas (Nugraheni & Sudarwati, 2021). Pendidikan terutama berperan meningkatkan kualitas hidup, tingkat kehidupan, dan pendapatan nasional dengan membuat orang lebih terbuka untuk menerima ide dan harapan baru. Selain itu, pendidikan merupakan landasan ideal untuk pembangunan dan merupakan jaminan bagi pertumbuhan berkelanjutan masyarakat modern.

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan merupakan bentuk keseriusan antar pasangan dan kedua pasangan tersebut secara resmi dapat saling bertemu di hadapan para penghulu, yang menyaksikan dan juga menghadirkan beberapa peserta agar diakui secara sah sebagai suami istri melalui ijab kabul (Astuty, 2013). Khaerani (2019) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan suatu bentuk pengikatan di mana salah satu pasangan masih berusia di bawah lima belas tahun atau sedang duduk dibangku SMA. Dengan demikian, suatu pernikahan dapat disebut pernikahan di bawah umur. Adapun hubungan pernikahan usia dini dalam pertumbuhan ekonomi ialah keluarga dari pernikahan usia dini rentan melahirkan keluarga miskin karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kemampuan mengakses pekerjaan juga rendah. Kurangnya persiapan keuangan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin. Selain itu, jika pasangan yang menikah dini hamil dan melahirkan

Pernikahan dini dapat mendatangkan dampak, baik maupun positif dan negatif. Menurut psikolog, pernikahan pada usia dini merupakan motivator untuk meningkatkan potensi diri pada segala aspek positif salah satunya dengan adanya cinta kasih yang berasal dari pernikahan menyebabkan rasa aman, nyaman yang akan memberikan dampak mental bagi seorang yang melakukan pernikahan (Hidayah, 2019). Riskayanti (2016) menyatakan adapun dampak pernikahan usia dini terhadap pembangunan ekonomi di antaranya dari aspek sosial meliputi aspek sosial ekonomi yang belum siap secara ekonomi, menyebabkan lapangan pekerjaan tidak efisien dan tidak mandiri secara ekonomi, serta pasangan yang menikah usia dini belum siap untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Hal ini akan menyebabkan pengangguran dan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Mereka belum siap menjadi orang tua, memainkan peran ayah dan ibu secara optimal.

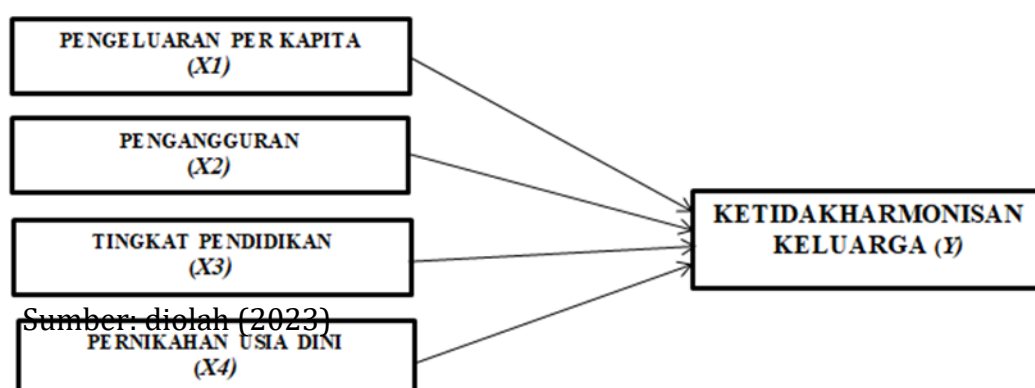
Perkawinan anak menimbulkan banyak dampak terhadap diri sendiri anak dan keluarganya. (Hidayah, 2019) menyatakan adapun dampak pernikahan usia dini terhadap suami istri mungkin menyebabkan pasangan muda mengalami kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan, mungkin tidak dapat menjalankannya, atau mungkin tidak menyadarinya. Hal ini terjadi karena ketidakmatangan fisik dan mental

mereka, sehingga mereka cenderung memiliki tingkat keegoisan yang tinggi. Dampak lain yang timbul pada pernikahan di usia muda dan di bawah umur juga sangat memengaruhi anak-anak. Bagi perempuan yang menikah di bawah usia dua puluh tahun, kehamilan dapat mengganggu rahim dan mempersulit persalinan sehingga sering ditemui anak-anak yang lahir dari pasangan muda akan memiliki kondisi fisik yang tidak sehat dan kondisi mental yang kurang stabil. Menikah di usia muda tidak hanya berdampak pada pasangan dan anak-anaknya, tetapi juga keluarga mereka. Pernikahan yang sukses antara anak-anak pasti akan menguntungkan orang tua. Namun di sisi lain, jika pernikahan mereka tidak bahagia maka akhirnya mereka akan bercerai. Ini akan meningkatkan biaya hidup mereka dan lebih buruk lagi dapat memutuskan ikatan keluarga di antara keduanya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk tujuan menarik kesimpulan tentang hipotesis yang diajukan dengan menganalisis data kuantitatif. Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel *independent* (X) yang keduanya merupakan data kuantitatif (data-data yang berbentuk angka) untuk menggambarkan keadaan secara umum hubungan antara pengeluaran per kapita, pengangguran, tingkat pendidikan, pernikahan usia dini terhadap perceraian/ketidakharmisan rumah tangga. Variabel bebas yaitu pengeluaran per kapita dalam penelitian ini disimbolkan dengan (X1) yakni nilai pengeluaran rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2007-2021 dalam satuan ribu rupiah; tingkat pengangguran disimbolkan dengan (X2) adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2007-2021 dalam satuan persen; tingkat pendidikan (X3) adalah persentase angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas selama periode 2007-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan; dan pernikahan usia dini (X4) persentase pernikahan dini sebelum umur 15 tahun selama periode 2007-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu ketidakharmisan keluarga (Y) adalah persentase keluarga yang sudah pisah atau cerai hidup di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2007-2021. Hubungan antara variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Hubungan Antara Variabel Penelitian



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi, dan sebagainya, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini berupa data rentang waktu (*time series*) selama kurun waktu tahun 2007-2021 berupa pengeluaran per kapita, pengangguran, tingkat pendidikan, pernikahan usia dini dan perceraian melalui situs laman Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan mengolah data dengan menggunakan Eviews 12 melalui teknik analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan model ekonometrika (Sitorus, 2020). Persamaan regresi berganda yang digunakan adalah: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$(1)

Y adalah ketidakharmonisan keluarga; α adalah konstanta; X_1 = pengeluaran per kapita; X_2 adalah pengangguran; X_3 adalah tingkat pendidikan; X_4 adalah pernikahan usia dini; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefisien regresi berganda; dan ϵ adalah *error term*.

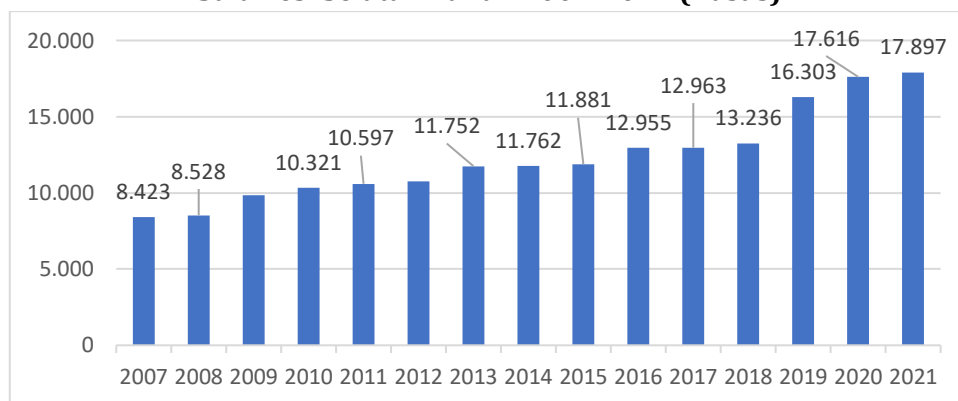
HASIL DAN DISKUSI

Ketidakharmisan Keluarga di Sulawesi Selatan

Ketidakharmisan keluarga merupakan suatu keadaan dalam keluarga dimana tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak ada saling pengertian, tidak ada rasa kebahagiaan (perasaan) puas, tidak ada komunikasi dan tidak ada rasa memiliki dalam kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan anggota keluarga (Madisa, 2017). Fenomena ketidakharmonisan dalam keluarga telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan angka perceraian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2017 terdapat sebanyak 12.963 pasangan bercerai, meningkat sepanjang 2018 menjadi 13.236 pasangan bercerai, meningkat sepanjang 2020 menjadi 17.616 dan meningkat kembali menjadi 17.897 pada tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah perceraian terus menerus setiap tahunnya.

Gambar 2 mengilustrasikan perkembangan perceraian di Sulawesi Selatan sejak tahun 2007 hingga tahun 2021, di mana dalam rentang waktu lima belas tahun terakhir terjadi peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2007 perceraian yang di capai di Sulawesi Selatan sejak lima belas tahun terakhir yaitu sebesar 8.423%. Pada tahun 2012 perceraian meningkat sebesar 10.771%. Sedangkan pada tahun 2021 perceraian tertinggi yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan sejak lima belas tahun terakhir yaitu sebesar 17.897%. Hal tersebut dinilai mengalami peningkatan, disebabkan pandemi Covid-19 yang membuat ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, adanya konflik di rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak heran jika banyak dari suami istri yang bercerai.

Gambar 2. Ketidakharmonisan Keluarga Dilihat Dari Tingkat Perceraian di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021 (Kasus)

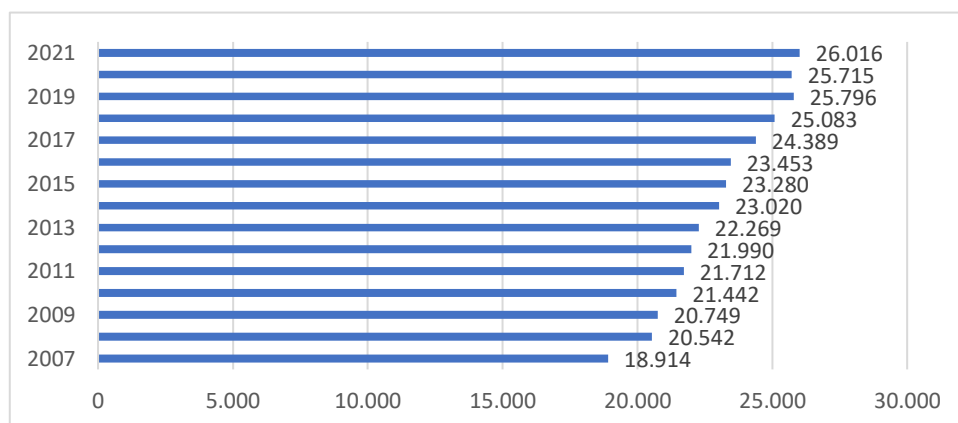


Sumber: (Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 2021, 2022)

Pengeluaran Per Kapita di Sulawesi Selatan

Pengeluaran per kapita didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk dikonsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga dalam satu bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPS pada Gambar 3 terlihat bahwa rata-rata pengeluaran kapita penduduk per tahun di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat. Pada tahun 2007 pengeluaran per kapita sebesar Rp18.914. Pada tahun 2012 pengeluaran per kapita meningkat sebesar Rp21.990. Kemudian pada tahun 2017 pengeluaran per kapita sebesar Rp24.389, sampai pada tahun 2021 pengeluaran per kapita sebesar Rp26.016. Hal tersebut menunjukkan daya beli masyarakat mengalami peningkatan seiring perbaikan kondisi ekonomi di Sulawesi Selatan.

Gambar 3. Pengeluaran Per Kapita di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021 (Ribu Rupiah)

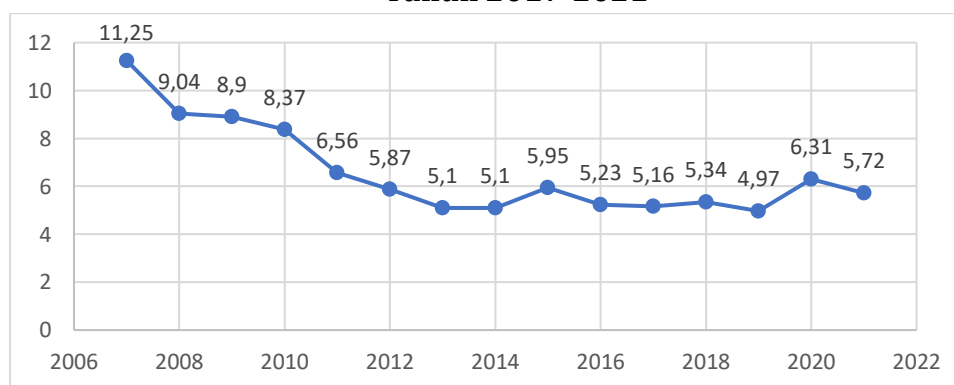


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2022), diolah

Pengangguran di Sulawesi Selatan

Pengangguran merupakan keadaan di mana orang-orang dalam angkatan kerja menganggur dan secara aktif mencari pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu negara, jumlah orang yang menganggur biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (Alimuddin, 2018). Berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPS pada Gambar 4 mengenai persentase pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan sebanyak 6.31% pada tahun 2020. Angka tersebut berada di urutan tertinggi pada lima tahun terakhir dikarenakan pada tahun 2020, pada saat itu pandemi Covid-19 mewabah di Sulawesi Selatan di mana pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga banyak dari masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Kemudian pada tahun 2021 angka pengangguran di Sulawesi Selatan berhasil ditekan sebesar 0,59%.

Gambar 4. Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan per Bulan Agustus Tahun 2017-2021

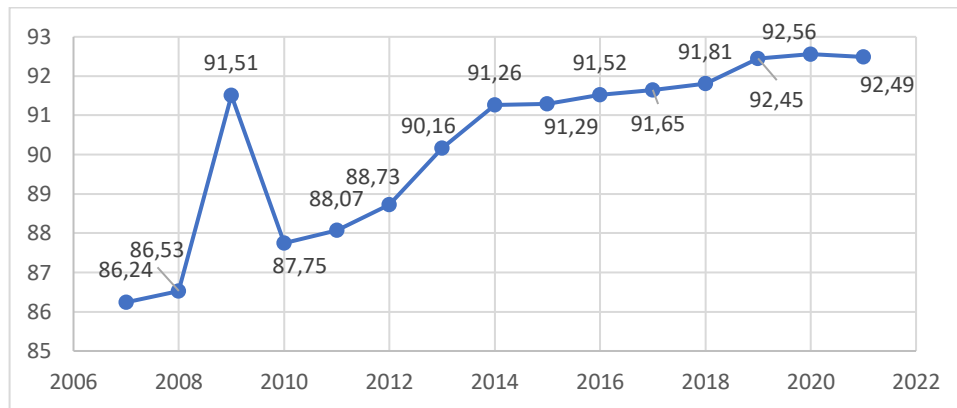


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2022), diolah

Tingkat Pendidikan di Sulawesi Selatan

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan adalah salah satu modal utama yang harus dipenuhi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi juga diyakini akan lebih baik. Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa di Sulawesi Selatan data jumlah pendidikan per tahun penduduk mengalami kenaikan. Pendidikan di Sulawesi Selatan yang terendah ada pada tahun 2007 yaitu sebesar 19.490% dan tingkat pendidikan yang tertinggi ada pada tahun 2015 sebesar 24.800%. Kemudian pendidikan yang tertinggi pada lima tahun terakhir ada pada tahun 2021 sebesar 23.563%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Gambar 4. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

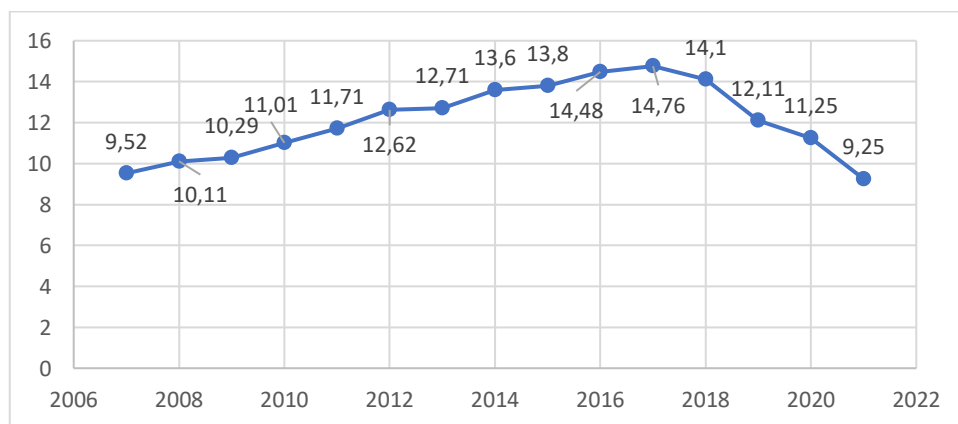


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2022), diolah

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sejak saat menikah, seseorang akan dapat menemukan keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, dan sosial pada saat yang bersamaan. Batas usia yang baik untuk menikah telah ditetapkan untuk wanita antara usia 21 dan 25 tahun dan pria antara usia 25 dan 27 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPS mengenai pernikahan usia dini di Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pernikahan usia dini di Sulawesi Selatan sebanyak 14.76% pada tahun 2017 (Gambar 5). Angka tersebut berada di urutan tertinggi pada lima tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2021 angka pernikahan usia dini di Sulawesi Selatan berhasil menurun sebesar 9.25%. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan mulai mengalami perbaikan.

Gambar 5. Kasus Pernikahan Usia Dini di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Hasil Penelitian

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa baik kemampuan model menjelaskan variabel dependen. Jika nilai *Adjusted R-squared* mendekati satu, berarti variabel bebas yaitu pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan pernikahan dini memberikan informasi yang paling diperlukan untuk memprediksi variabel terikat yaitu perselisihan keluarga. Hasil perhitungan koefisien determinasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel Independent	Variabel Dependent	Adjusted R-Square
Pengeluaran Per Kapita, Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Pernikahan Usia Dini	Ketidakharmonisan Keluarga	0,794357

Sumber: Hasil Pengolahan *Eviews* 10 (2022)

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh dengan menggunakan program *Eviews* 12, dihasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,794357 yang berarti jumlah variabel bebas pengeluaran per kapita, pengangguran, pendidikan dan pernikahan dini dalam persamaan dapat menjelaskan pengaruh terhadap beban tanggungan. Variabel perselisihan keluarga sebesar 79% sedangkan sisanya $(100-79) = 21\%$ dipengaruhi oleh faktor selain variabel penelitian.

Pengujian Parsial (Uji-t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel bebas yaitu pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan pernikahan dini berpengaruh signifikan atau tidaknya untuk memperhitungkan variabel terikat perselisihan keluarga dalam evaluasi variabel lain sebagai konstanta. Hasil uji parsial (Uji-t) melalui Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas	Keterangan
C	-10147561	-3.249339	0.0087	Signifikan
(LN X_1)	14.43634	2.785312	0.01939	Signifikan
(X_2)	-0.069748	-2.221153	0.0506	Signifikan
(X_3)	1.310524	1.541824	0.1541	Tidak Signifikan
(X_4)	-1.815099	-2.619422	0.0256	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan *Eviews* 12 (2023)

Berdasarkan hasil olahan data menghasilkan nilai t-statistik bernilai positif 2.785312 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0193 maka dapat diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel pengeluaran per kapita lebih kecil dari α ($0.0193 < 0.05$) maka hipotesis ini diterima. Sehingga variabel pengeluaran per kapita secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga. Kemudian nilai t-statistik bernilai negatif -2.221153 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0506 maka dapat diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel pengangguran lebih kecil dari α ($0.0506 < 0.05$) maka hipotesis ini diterima. Sehingga variabel pengangguran secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga.

Selanjutnya nilai t-statistik bernilai positif 1.541824 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1541 diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel pendidikan lebih besar dari α ($0.1541 < 0.05$) maka hipotesis ini tidak diterima. Sehingga variabel pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga. Sedangkan nilai t-statistik bernilai negatif -2.619422 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0256 diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel pernikahan usia dini lebih kecil dari α ($0.0256 < 0.05$). Sehingga variabel pernikahan usia dini secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga.

Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-F statistik bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengeluaran per kapita (X_1), pengangguran (X_2), tingkat pendidikan (X_3) dan pernikahan usia dini (X_4) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu ketidakharmonisan keluarga (Y) secara signifikan pada masing-masing variabel. Hasil perhitungan uji-F dapat dilihat Tabel 3.

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh nilai F-statistik sebesar 14.51981 dengan nilai *probability F-stat* $0.000360 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas yaitu pengeluaran per kapita, pengangguran, tingkat pendidikan dan pernikahan usia dini yang digunakan dalam model persamaan, mempengaruhi variabel terikat yaitu ketidakharmonisan keluarga secara signifikan pada tingkat kepercayaan 79%.

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Variabel Independen	Variabel Dependen	F hitung	Sig. F	Keterangan
Pengeluaran Per Kapita, Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Pernikahan Usia Dini	Ketidakharmonisan Keluarga	14.51981	0.000360	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan *Eviews 12* (2023)

Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Ketidakharmonisan Keluarga

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran per kapita maka tingkat keharmonisan dalam keluarga semakin baik, artinya setiap kenaikan pengeluaran per kapita membuat daya beli masyarakat juga terus mengalami peningkatan seiring perbaikan kondisi ekonomi nasional, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi dan menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga menjadi lebih kuat. Peningkatan pengeluaran per kapita ini terjadi lantaran pertumbuhan industri manufaktur, meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

Hal ini sesuai dengan data yang telah dijelaskan selama lima tahun terakhir yakni ketidakharmonisan keluarga di Sulawesi Selatan dengan pengeluaran per kapita di

Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2017 hingga tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan kini tengah menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyadi (2015); T. Herawati dkk. (2017); Husniah dkk. (2022); Sofyan (2011); dan Siregar (2018) yang mengungkapkan adanya hubungan antara pengeluaran per kapita rumah tangga dan ketidakharmonisan keluarga.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketidakharmonisan Keluarga

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengangguran terhadap ketidakharmonisan keluarga memiliki nilai tidak signifikan $0.506 < 0.05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.069748 yang berarti pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 hingga tahun 2021. Dari hasil regresi diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif dan lemah dengan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin meningkat perceraian. Apabila tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan tinggi, maka akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur, dan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, mereka yang menganggur lebih berisiko untuk mengalami perceraian dikarenakan menganggur dapat menjadi permasalahan ekonomi dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marzuki & Watampone, (2016) dan Santosa dkk. (2020) yang menemukan bahwa tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fox & Bartholomae, 2000; Higginbotham & Felix, 2009; Kusuma, 2013; Tati, 2004) yang menunjukkan pengangguran berpengaruh negatif terhadap ketidakharmonisan keluarga.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Ketidakharmonisan Keluarga

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terhadap ketidakharmonisan keluarga memiliki nilai tidak signifikan $0.1541 < 0.05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.310524 yang berarti pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 hingga tahun 2021. Dari hasil regresi diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga karena sebagai masyarakat juga tidak terlalu mementingkan pendidikan bahwa yang terpenting dalam keluarga adalah adanya saling menghormati antara masing-masing pasangan serta menerima kekurangan dan kelebihan pasangan serta bertanggung jawab untuk saling memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami istri baik kebutuhan jasmani dan rohani.

Aditama (2020) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga karena mereka sama-sama mengakui memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam arti tidak terlalu banyak mengenyam pendidikan dalam pengelolaan keluarga. dengan ibadah, mereka percaya bahwa keluarga akan bekerja

rukun jika semua hal ini dapat berjalan dengan baik, maka tanpa pendidikan keluarga dapat bekerja dengan rukun dan bahagia.

Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Ketidakharmonisan Keluarga

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pernikahan usia dini terhadap ketidakharmonisan keluarga memiliki nilai signifikan $0.0256 < 0.05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.815099 yang berarti pernikahan usia dini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 hingga tahun 2021. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maslul (2021), Fely (2021), Satriawan (2021), Farah (2020) dan Kheirani (2019) menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berpengaruh negatif terhadap ketidakharmonisan keluarga. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2021), Sunarti (2021) dan Anwar (2021) menemukan bahwa dengan menikah di usia dini akan lebih meringankan beban orang tua yang ekonominya rendah serta terhindar dari perilaku seks bebas, maka ini berpengaruh positif terhadap ketidakharmonisan keluarga.

Tingkat pernikahan usia dini di Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi, maka tingkat ketidakharmonisan keluarga akan meningkat karena pernikahan usia dini masih menjadi sebuah polemik di Sulawesi Selatan (Gambar 5). Pernikahan anak berdampak pada keharmonisan keluarga yang dibangun. Di usia yang masih muda, masih terdapat luka psikis, ketidaksiapan semangat, emosi yang tinggi yang membuat keharmonisan keluarga semakin buruk. Apalagi jika melihat kenyataan, banyak pasangan muda menikah bukan karena prasyarat keharmonisan keluarga, tetapi hanya karena persiapan fisik. Sedangkan mempersiapkan pernikahan berarti kemauan untuk membentuk keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengambil sampel ketidakharmonisan keluarga tahun 2007-2021 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga di Sulawesi Selatan selama periode 2007-2021. Ketidakharmonisan keluarga akan terjadi jika kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, maka akan memicu pertengkaran jika tidak adanya rasa lapang dada dan bersyukur dalam diri suami dan istri serta anak-anaknya.
2. Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga. Hal tersebut dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga jika pihak istri yang tidak puas dalam kondisi berkurangnya pemasukan menjadi stres dan akhirnya pertengkaran dalam keluarga terjadi. Jika hal ini terus berlanjut maka akan berujung perceraian.
3. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga. Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pendidikan bahwa yang terpenting dalam keluarga adalah adanya saling menghormati antara

masing-masing pasangan serta menerima kekurangan dan kelebihan pasangan serta bertanggung jawab untuk saling memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami istri.

4. Pernikahan usia dini berpengaruh signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga. Pernikahan dini ini sering kali menimbulkan masalah psikologis atau kesehatan mental pada wanita. Salah satunya adalah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- Afif, M. N., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita, Harga Rokok, Produksi Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1), 88–92.
- Alimuddin, C. (2018). *Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar (Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Di Kota Makassar 2010-2014)*. Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.
- Amelia, R. (2017). *Analisis Determinan Tingkat Pengangguran di Kota Makassar Periode 2005-2015*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Andika. (2019). *Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja*. 2(30), 1.
- Apriliani, F. T. , & Nurwati, N. (2020). *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*. 90–99.
- Astuty, S. Y. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare State*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal*.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021*.
- Chikmah, N. (2021). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai terhadap Produktivitas Kerja di Kementerian Agama Kabupaten Gresik* . UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Eleanora, F. N., & Putri, A. H. (2021). Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1501–1508.
- Fox, J. J., & Bartholomae, S. (2000). *Families and Individuals Coping with Financial Stress: Families & Change Coping With Stressful Events and Transitions* (2 ed.). Sage Publication, Inc.
- Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat). *Tasâmuh*, 18(1), 114–137.

- Hariyadi, E. , & H. R. M. (2015). *Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah*. Universitas Diponegara.
- Herawati, T. , Tyas, F. P. S. , & Trijayanti, L. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(3), 181–191.
- Herawati, T., Tyas, F. P. S., & Trijayanti, L. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia MUda. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 10(3), 181–191. <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.181>
- Hidayah, T. H. (2019). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
- Higginbotham, B. J., & Felix, D. (2009). Economic Predictors Of Marital Quality Among Newly Remarried Rural And Urban Couples. *Family Science Review*, 14(2), 18–30.
- Husniah, Saharuddin, Anwar, K., & Juliansyah, H. (2022). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), 96–109.
- Irawan, K. K. (2022). *Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal, Kemiskinan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13.
- Kusuma, E. A. (2013). *Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Latifah, L. S. (2020). *Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Bagi Perilaku Remaja (Studi di Desa Pakisaji dan Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Madisa, D. (2017). *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Marzuki, S. N. , & Watampone, S. T. A. I. N. S. (2016). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 179-196.
- Ni'mah, N. (2018). *Pengaruh keharmonisan dalam keluarga terhadap kesehatan mental anak di desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur* . IAIN Metro.
- Nugraheni, H. R., & Sudarwati, N. (2021). Kontribusi Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 1–11.
- Pengadilan Tinggi Agama Makassar. (2021). *Data Tingkat Perceraian Di Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Pengadilan Tinggi Agama Makassar. (2022). *Data Tingkat Perceraian Di Provinsi Sulawesi Selatan*.

- Riskayanti, R. (2016). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Binanga Sombaya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Santosa, A. D. , Lastariwati, B. , Sovitriana, R. , Nilawati, E. , & Trisnawati, N. (2020). Ketahanan Keluarga Sebagai Pilar Pembangunan (Analisis Kualitatif Menggunakan Nvivo). *Ikra-Ith Abdimas* , 3(2), 69–80.
- Siregar, N. A. (2018). Analisis Korelasi Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Sosial dengan Tingkat Pendapatan sebagai Contingency Variable di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Pundi*, 2(1).
- Sofyan, M. (2011). *Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar (M2) dan Inflasi Terhadap Jumlah Tabungan di Indonesia*. UIN Jakarta.
- Syakhsiyah, A. (2022). *Analisis Faktor Ketidakharmis-an Rumah Tangga Wanita Pekerja Pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak* . UIN Sultan Agung Semarang.
- Tati. (2004). *Pengaruh Tekanan Ekonomi Keluarga, Dukungan Sosial dan Kualitas Perkawinan terhadap Pengasuhan Anak*. Institut Pertanian Bogor.
- Totoh, A. (2020, September 10). *Pendidikan (Ketahanan) Keluarga*. Kumparan.
- Wijaya, J. A. (2022). Relevansi Kadar Pemberian Nafkah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Masyarakat. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5), 702–709. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2790>
- Yacoub, Y. (2013). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Politeknik Negeri Pontianak.
- Zalfa, N. (2019). *Persepsi masyarakat terhadap penyuluhan keluarga berencana di kampung KB dalam meningkatkan ketahanan keluarga: penelitian di kampung KB Pasir Kunci Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.